



PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKOLAH RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk optimalisasi penyelenggaraan pendidikan pada sekolah rakyat, perlu penataan organisasi dan tata kerja Sekolah Rakyat;
- b. bahwa penataan organisasi dan tata kerja Sekolah Rakyat sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Rakyat;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5. Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 358);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 822) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1637);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 206);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 136);
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 222) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 504);
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 509);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKOLAH RAKYAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 509) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Sekolah Rakyat adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah berbasis asrama dengan mengedepankan pembentukan karakter dan kecakapan hidup dengan biaya sepenuhnya ditanggung pemerintah.
 2. Kepala Sekolah Rakyat yang selanjutnya disebut Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas untuk memimpin pembelajaran dan mengelola Sekolah Rakyat.
 3. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
 4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
 5. Kepala Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut Kepala Pusat adalah pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kementerian yang mempunyai tugas melaksanakan pendidikan, pelatihan, dan pengembangan profesi kesejahteraan sosial serta penyelenggaraan Sekolah Rakyat.
2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Sekolah Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas:
 - a. Sekolah Rakyat Dasar;
 - b. Sekolah Rakyat Menengah Pertama;
 - c. Sekolah Rakyat Menengah Atas; dan
 - d. Sekolah Rakyat Terintegrasi.
 - (2) Sekolah Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Sekolah Rakyat rintisan.
3. Sebelum Bagian Kesatu Bab III ditambahkan 1 (satu) bagian yaitu Bagian Kesatu sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesatu Sekolah Rakyat Dasar

4. Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 3A, Pasal 3B, Pasal 3C, dan Pasal 3D sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

Sekolah Rakyat Dasar mempunyai tugas melaksanakan pendidikan formal jenjang pendidikan dasar kelas I sampai dengan kelas VI bagi peserta didik yang berasal dari keluarga miskin ekstrem dan miskin.

Pasal 3B

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A, Sekolah Rakyat Dasar menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran umum serta pendidikan karakter berbasis asrama;
- c. pelaksanaan bimbingan dan konseling serta pengembangan ekstrakurikuler;
- d. pengelolaan sarana, prasarana, serta unit penunjang pengajaran;
- e. pelaksanaan administrasi akademik dan kesiswaan;
- f. pengumpulan dan pengolahan data dan informasi pendidikan;
- g. pelaksanaan kerja sama;
- h. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- i. pelaksanaan administrasi umum.

Pasal 3C

Susunan organisasi Sekolah Rakyat Dasar terdiri atas:

- a. Kepala Sekolah; dan
- b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 3D

Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3C huruf a melaksanakan tugas manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan.

5. Bagian Kesatu Bab III diubah menjadi Bagian Kedua Bab III sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua

Sekolah Rakyat Menengah Pertama

6. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Sekolah Rakyat Menengah Pertama mempunyai tugas melaksanakan pendidikan formal jenjang pendidikan dasar kelas VII sampai dengan kelas IX bagi peserta didik yang berasal dari keluarga miskin ekstrem dan miskin.

7. Bagian Kedua Bab III diubah menjadi Bagian Ketiga Bab III sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga

Sekolah Rakyat Menengah Atas

8. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Sekolah Rakyat Menengah Atas mempunyai tugas melaksanakan pendidikan formal jenjang pendidikan menengah kelas X sampai dengan kelas XII bagi peserta didik yang berasal dari keluarga miskin ekstrem dan miskin.

9. Bagian Ketiga Bab III diubah menjadi Bagian Keempat Bab III sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat
Sekolah Rakyat Terintegrasi

10. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Sekolah Rakyat Terintegrasi mempunyai tugas melaksanakan pendidikan formal jenjang pendidikan dasar dan/atau menengah secara terintegrasi bagi peserta didik yang berasal dari keluarga miskin ekstrem dan miskin.

11. Bagian Keempat Bab III diubah menjadi Bagian Kelima Bab III sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kelima
Unit Penunjang Sekolah Rakyat

12. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

Bagan susunan organisasi Sekolah Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3C, Pasal 6, Pasal 12, dan Pasal 19 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

13. Di antara Pasal 33 dan Pasal 34 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 33A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33A

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Sekolah ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian Wakil Kepala Sekolah ditetapkan oleh Kepala Sekolah setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala Pusat.

14. Ketentuan ayat (1) Pasal 34 diubah sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Jumlah Sekolah Rakyat di lingkungan Kementerian terdiri atas:

- a. 8 (delapan) Sekolah Rakyat Dasar;
 - b. 34 (tiga puluh empat) Sekolah Rakyat Menengah Pertama;
 - c. 46 (empat puluh enam) Sekolah Rakyat Menengah Atas; dan
 - d. 78 (tujuh puluh delapan) Sekolah Rakyat Terintegrasi.
- (2) Nomenklatur dan lokasi masing-masing Sekolah Rakyat tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
15. Ketentuan Lampiran I Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Rakyat diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
16. Ketentuan Lampiran II Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Rakyat diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 November 2025

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

SAIFULLAH YUSUF

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

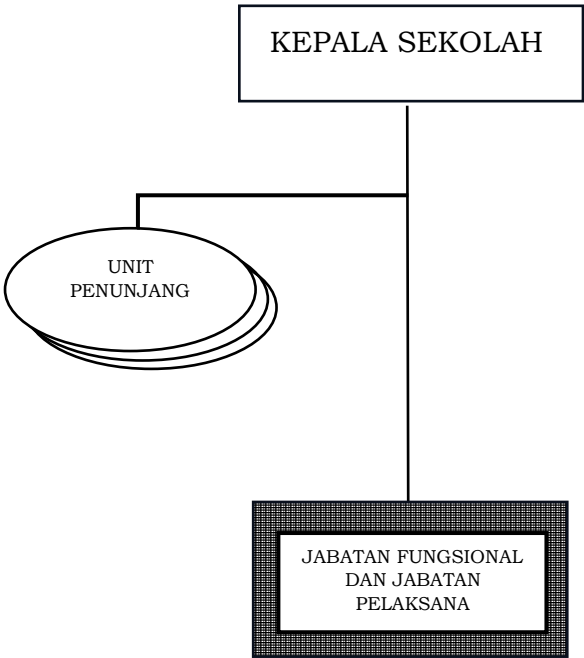
DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
MENTERI SOSIAL NOMOR 7
TAHUN 2025 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKOLAH RAKYAT

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI SEKOLAH RAKYAT

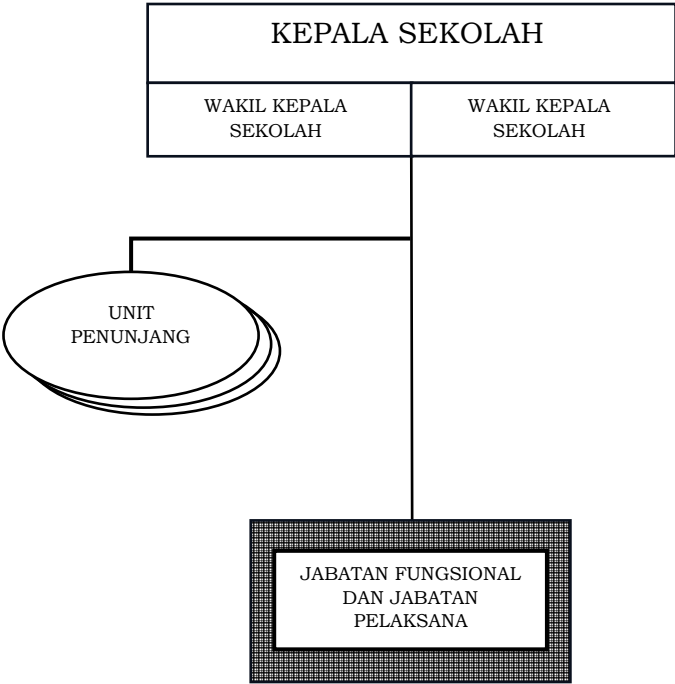
- A. Bagan Susunan Organisasi Sekolah Rakyat Dasar
1. Sekolah Rakyat Dasar



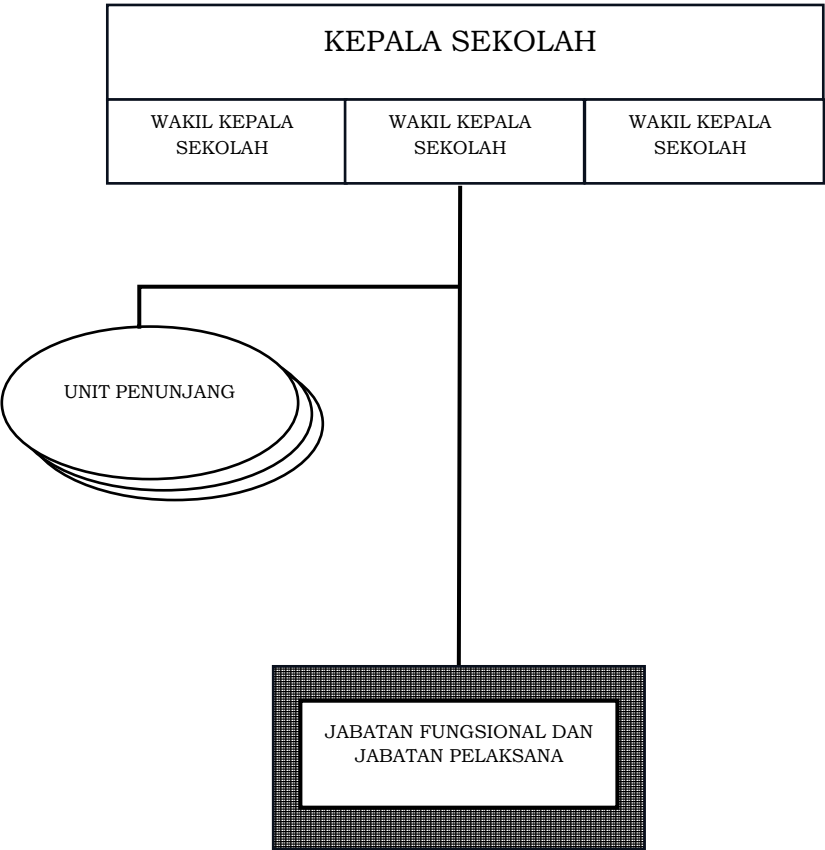
- B. Bagan Susunan Organisasi Sekolah Rakyat Menengah Pertama
1. Sekolah Rakyat Menengah Pertama dengan 1 (satu) wakil Kepala Sekolah



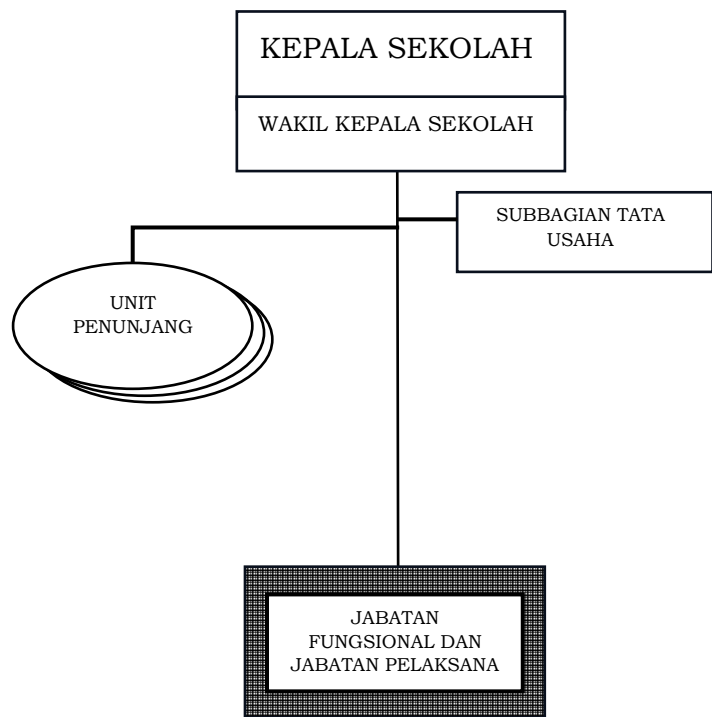
2. Sekolah Rakyat Menengah Pertama dengan 2 (dua) wakil Kepala Sekolah



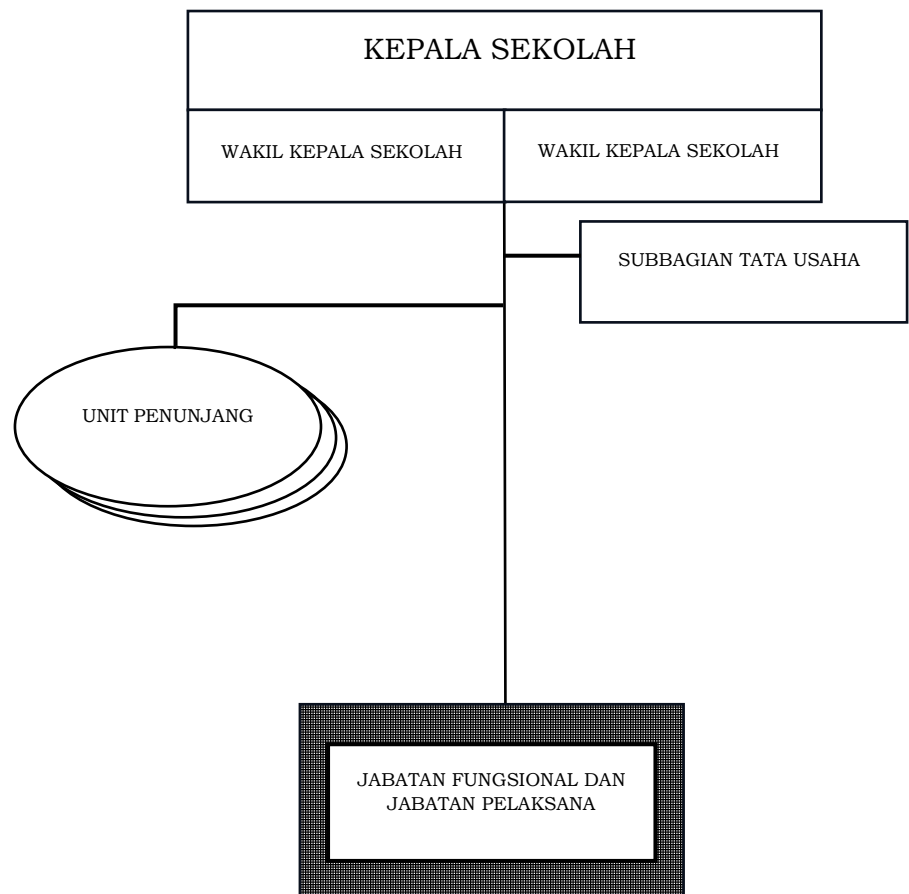
3. Sekolah Rakyat Menengah Pertama dengan 3 (tiga) wakil Kepala Sekolah



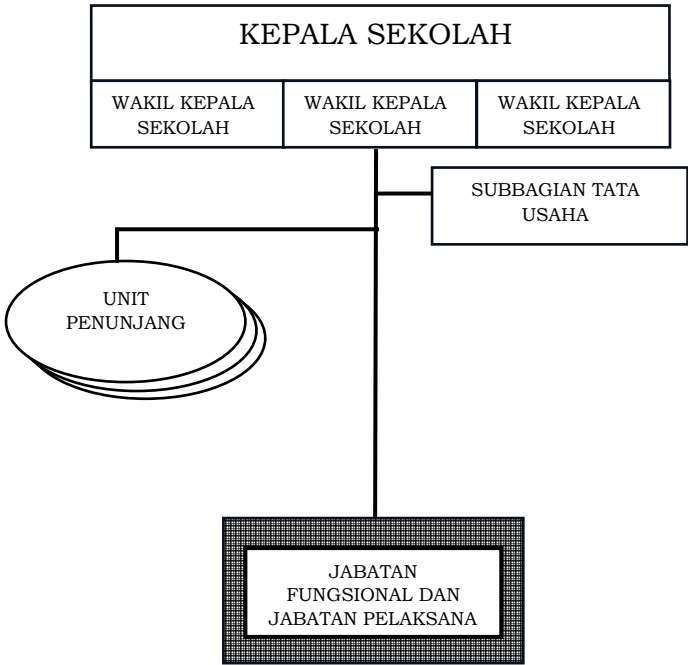
- C. Bagan Susunan Organisasi Sekolah Rakyat Menengah Atas
1. Sekolah Rakyat Menengah Atas dengan 1 (satu) wakil Kepala Sekolah



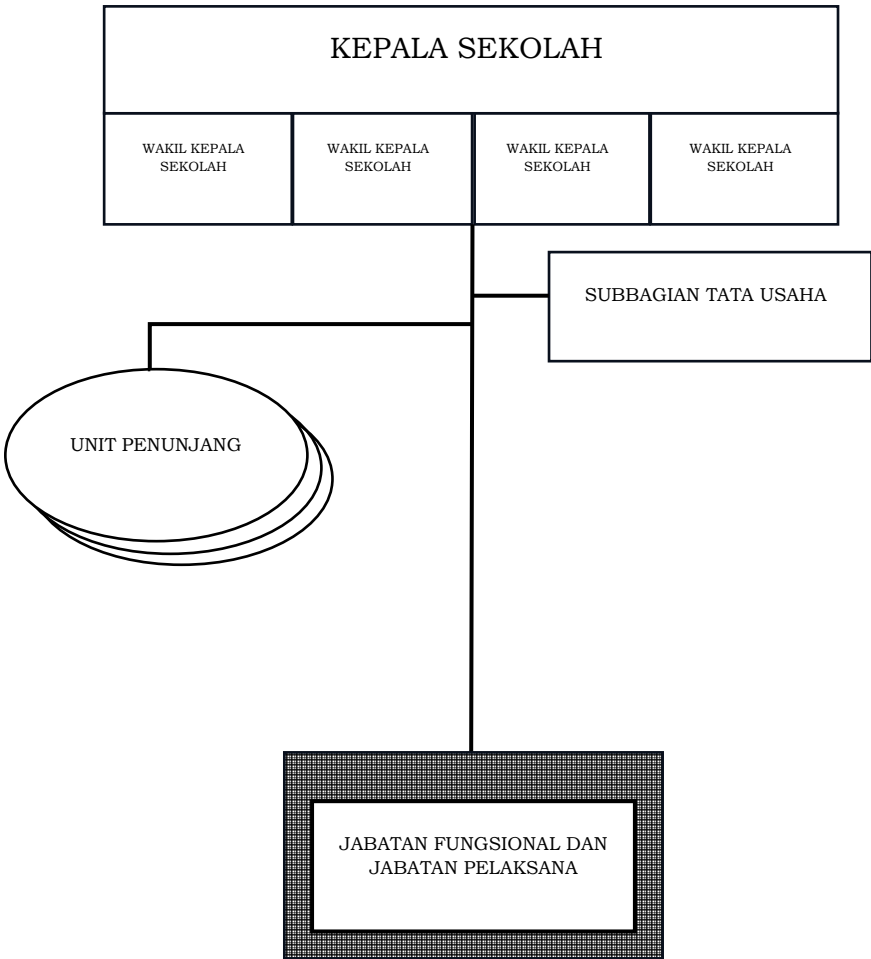
2. Sekolah Rakyat Menengah Atas dengan 2 (dua) wakil Kepala Sekolah



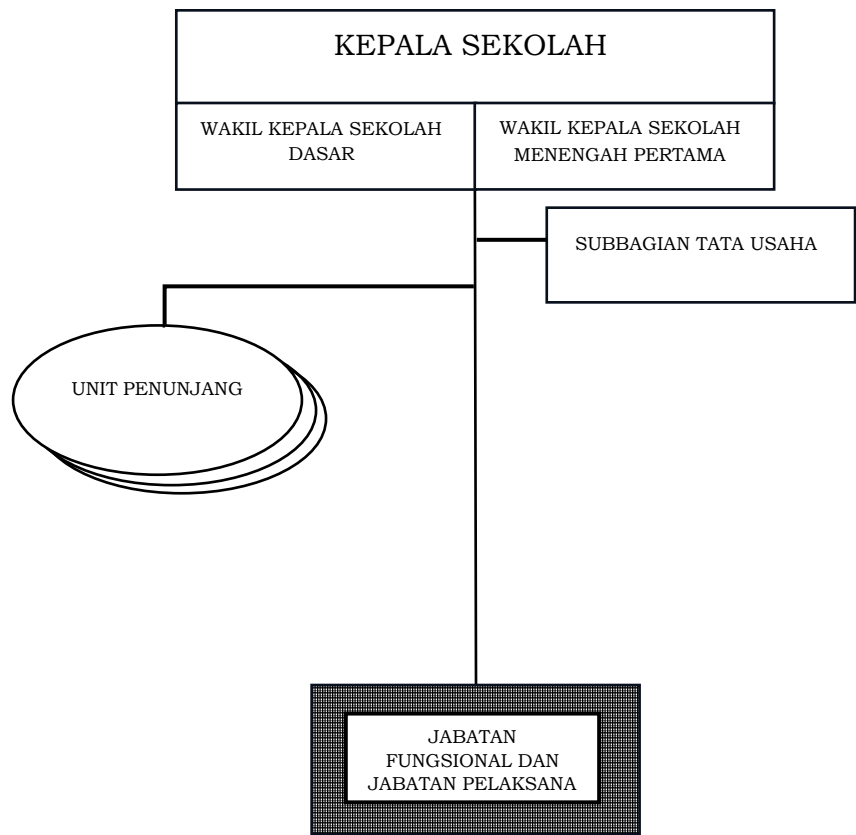
3. Sekolah Rakyat Menengah Atas dengan 3 (tiga) wakil Kepala Sekolah



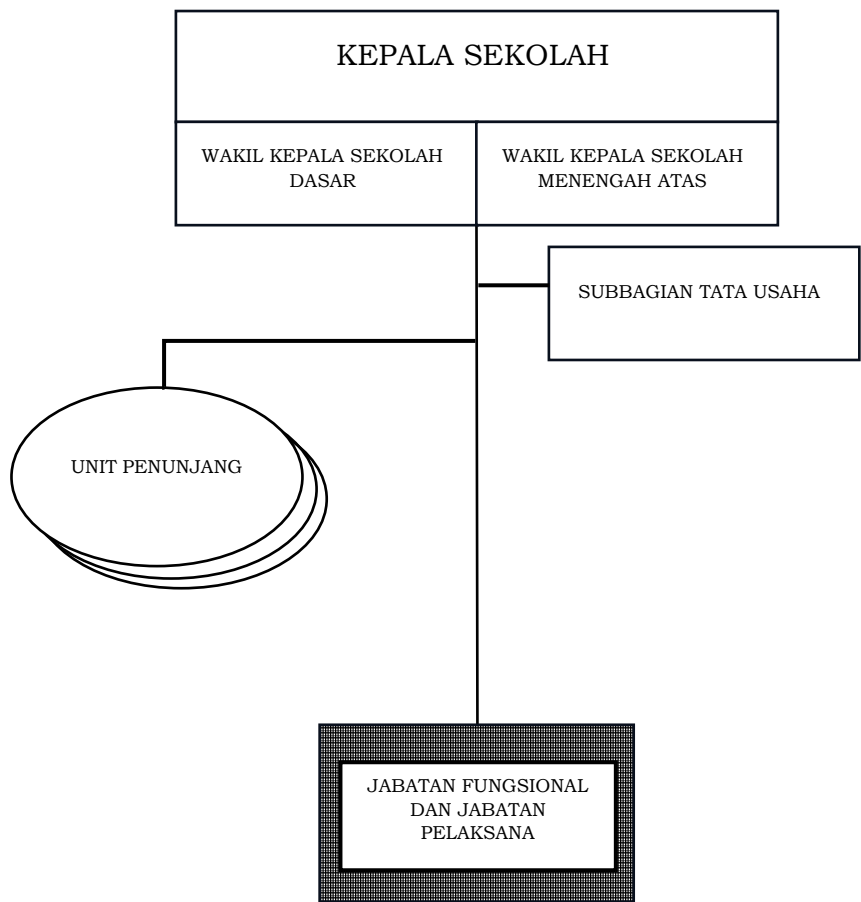
4. Sekolah Rakyat Menengah Atas dengan 4 (empat) wakil Kepala Sekolah



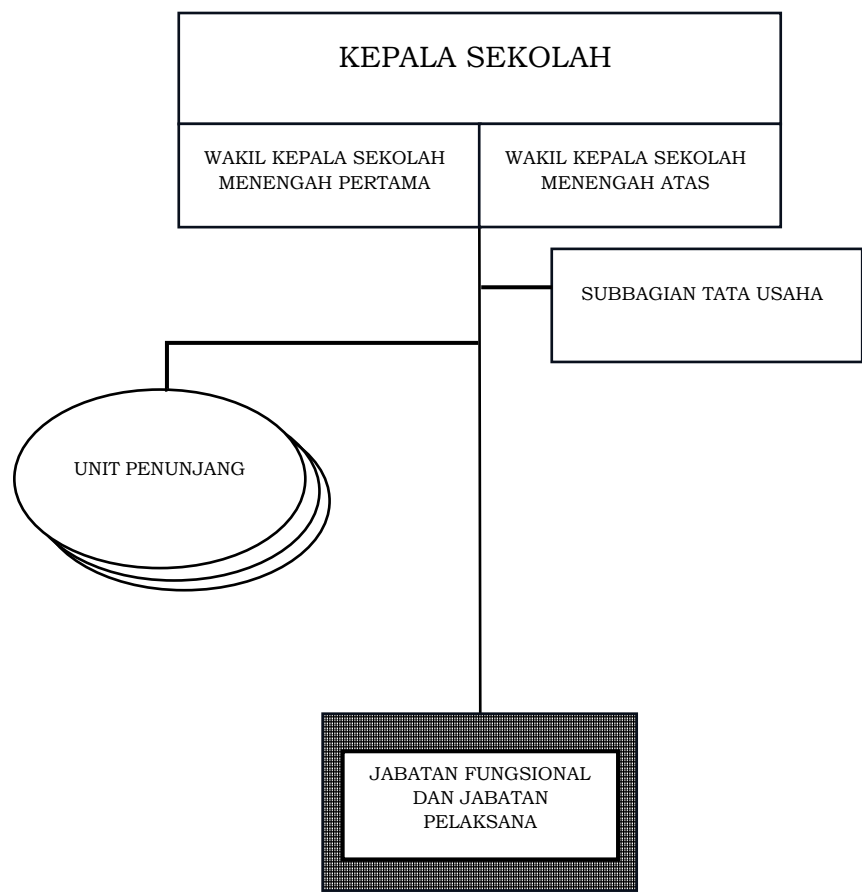
- D. Bagan Susunan Organisasi Sekolah Rakyat Terintegrasi
1. Sekolah Rakyat Terintegrasi dengan 1 (satu) wakil Kepala Sekolah Dasar dan 1 (satu) wakil Kepala Sekolah Menengah Pertama



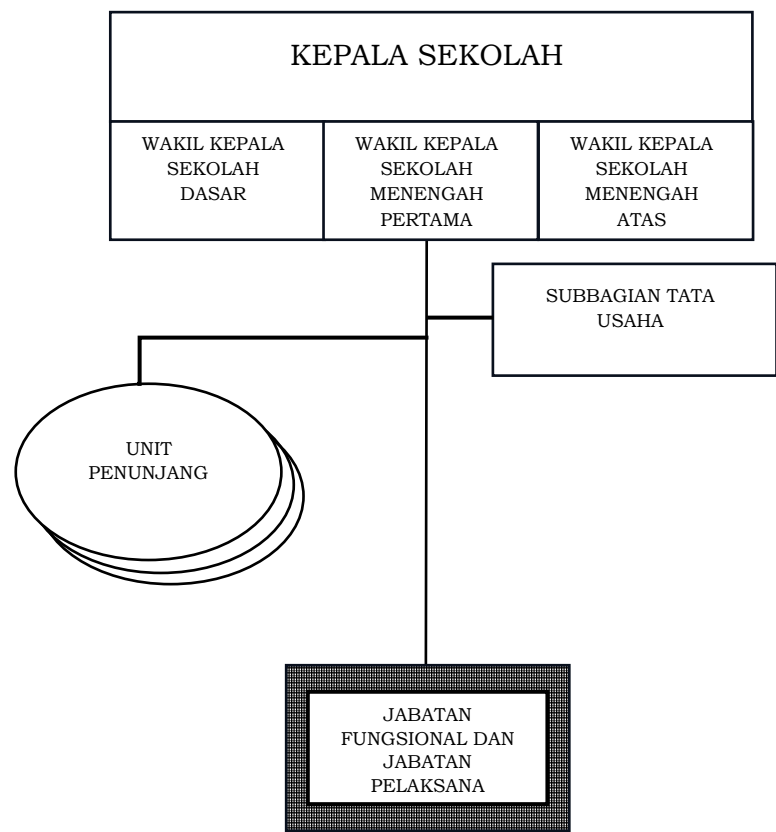
2. Sekolah Rakyat Terintegrasi dengan 1 (satu) wakil Kepala Sekolah Dasar dan 1 (satu) wakil Kepala Sekolah Menengah Atas



3. Sekolah Rakyat Terintegrasi dengan 1 (satu) wakil Kepala Sekolah Menengah Pertama dan 1 (satu) wakil Kepala Sekolah Menengah Atas



4. Sekolah Rakyat Terintegrasi dengan 1 (satu) wakil Kepala Sekolah Dasar, 1 (satu) wakil Kepala Sekolah Menengah Pertama, 1 (satu) wakil Kepala Sekolah Menengah Atas



MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAIFULLAH YUSUF

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
MENTERI SOSIAL NOMOR 7
TAHUN 2025 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKOLAH RAKYAT

NOMENKLATUR DAN LOKASI SEKOLAH RAKYAT
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL

A. Sekolah Rakyat Dasar

| NO | NOMENKLATUR | LOKASI |
|----|--|---|
| 1 | Sekolah Rakyat Dasar 1 Jepara | Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah |
| 2 | Sekolah Rakyat Dasar 2 Surakarta | Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah |
| 3 | Sekolah Rakyat Dasar 3 Lombok Timur | Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat |
| 4 | Sekolah Rakyat Dasar 4 Lombok Barat | Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat |
| 5 | Sekolah Rakyat Dasar 5 Sumbawa | Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat |
| 6 | Sekolah Rakyat Dasar 6 Palangkaraya | Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah |
| 7 | Sekolah Rakyat Dasar 7 Tidore Kepulauan | Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara |
| 8 | Sekolah Rakyat Dasar 8 Ternate | Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara |

B. Sekolah Rakyat Menengah Pertama

| NO | NOMENKLATUR | LOKASI |
|----|--|---|
| 1 | Sekolah Rakyat Menengah Pertama 1 Deli Serdang | Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara |
| 2 | Sekolah Rakyat Menengah Pertama 2 Medan | Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara |
| 3 | Sekolah Rakyat Menengah Pertama 3 Pekanbaru | Kota Pekanbaru, Provinsi Riau |
| 4 | Sekolah Rakyat Menengah Pertama 4 Padang | Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat |
| 5 | Sekolah Rakyat Menengah Pertama 5 Solok | Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat |
| 6 | Sekolah Rakyat Menengah Pertama 6 Jakarta Timur | Kota Administratif Jakarta Timur, Provinsi Daerah Khusus Jakarta |
| 7 | Sekolah Rakyat Menengah Pertama 7 Sukabumi | Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat |
| 8 | Sekolah Rakyat Menengah Pertama 8 Cimahi | Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat |
| 9 | Sekolah Rakyat Menengah Pertama 9 Bandung | Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat |

| NO | NOMENKLATUR | LOKASI |
|----|--|--|
| 10 | Sekolah Rakyat Menengah Pertama 10 Bogor | Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat |
| 11 | Sekolah Rakyat Menengah Pertama 11 Bandung Barat | Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat |
| 12 | Sekolah Rakyat Menengah Pertama 12 Pati | Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah |
| 13 | Sekolah Rakyat Menengah Pertama 13 Banyumas | Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah |
| 14 | Sekolah Rakyat Menengah Pertama 14 Batu | Kota Batu, Provinsi Jawa Timur |
| 15 | Sekolah Rakyat Menengah Pertama 15 Mojokerto | Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur |
| 16 | Sekolah Rakyat Menengah Pertama 16 Malang | Kota Malang, Provinsi Jawa Timur |
| 17 | Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan | Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali |
| 18 | Sekolah Rakyat Menengah Pertama 18 Lombok Barat | Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat |
| 19 | Sekolah Rakyat Menengah Pertama 19 Kupang | Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur |
| 20 | Sekolah Rakyat Menengah Pertama 20 Banjarbaru | Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan |
| 21 | Sekolah Rakyat Menengah Pertama 21 Manado | Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara |
| 22 | Sekolah Rakyat Menengah Pertama 22 Sigi | Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah |
| 23 | Sekolah Rakyat Menengah Pertama 23 Makassar | Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan |
| 24 | Sekolah Rakyat Menengah Pertama 24 Gowa | Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan |
| 25 | Sekolah Rakyat Menengah Pertama 25 Kendari | Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara |
| 26 | Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate | Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara |
| 27 | Sekolah Rakyat Menengah Pertama 27 Banjarnegara | Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah |
| 28 | Sekolah Rakyat Menengah Pertama 28 Pasuruan | Kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur |
| 29 | Sekolah Rakyat Menengah Pertama 29 Pamekasan | Kabupaten Pamekasan, Provinsi Jawa Timur |
| 30 | Sekolah Rakyat Menengah Pertama 30 Sidenreng Rappang | Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan |
| 31 | Sekolah Rakyat Menengah Pertama 31 Takalar | Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan |
| 32 | Sekolah Rakyat Menengah Pertama 32 Halmahera Utara | Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara |
| 33 | Sekolah Rakyat Menengah Pertama 33 Lhokseumawe | Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh |
| 34 | Sekolah Rakyat Menengah Pertama 34 Majalengka | Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat |

C. Sekolah Rakyat Menengah Atas

| NO | NOMENKLATUR | LOKASI |
|----|---|--|
| 1 | Sekolah Rakyat Menengah Atas 1 Aceh Besar | Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh |
| 2 | Sekolah Rakyat Menengah Atas 2 Aceh Besar | Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh |
| 3 | Sekolah Rakyat Menengah Atas 3 Tebing Tinggi | Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara |
| 4 | Sekolah Rakyat Menengah Atas 4 Padang | Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat |
| 5 | Sekolah Rakyat Menengah Atas 5 Jambi | Kota Jambi, Provinsi Jambi |
| 6 | Sekolah Rakyat Menengah Atas 6 Bengkulu | Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu |
| 7 | Sekolah Rakyat Menengah Atas 7 Palembang | Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan |
| 8 | Sekolah Rakyat Menengah Atas 8 Ogan Ilir | Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan |
| 9 | Sekolah Rakyat Menengah Atas 9 Jakarta Timur | Kota Administratif Jakarta Timur, Provinsi Daerah Khusus Jakarta |
| 10 | Sekolah Rakyat Menengah Atas 10 Jakarta Selatan | Kota Administratif Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Jakarta |
| 11 | Sekolah Rakyat Menengah Atas 11 Bandung | Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat |
| 12 | Sekolah Rakyat Menengah Atas 12 Bogor | Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat |
| 13 | Sekolah Rakyat Menengah Atas 13 Bekasi | Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat |
| 14 | Sekolah Rakyat Menengah Atas 14 Bandung Barat | Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat |
| 15 | Sekolah Rakyat Menengah Atas 15 Magelang | Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah |
| 16 | Sekolah Rakyat Menengah Atas 16 Temanggung | Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah |
| 17 | Sekolah Rakyat Menengah Atas 17 Surakarta | Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah |
| 18 | Sekolah Rakyat Menengah Atas 18 Blora | Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah |
| 19 | Sekolah Rakyat Menengah Atas 19 Bantul | Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta |
| 20 | Sekolah Rakyat Menengah Atas 20 Sleman | Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta |
| 21 | Sekolah Rakyat Menengah Atas 21 Surabaya | Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur |
| 22 | Sekolah Rakyat Menengah Atas 22 Malang | Kota Malang, Provinsi Jawa Timur |
| 23 | Sekolah Rakyat Menengah Atas 23 Pacitan | Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur |
| 24 | Sekolah Rakyat Menengah Atas 24 Kediri | Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur |
| 25 | Sekolah Rakyat Menengah Atas 25 Lamongan | Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur |
| 26 | Sekolah Rakyat Menengah Atas 26 Makassar | Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan |

| NO | NOMENKLATUR | LOKASI |
|----|---|--|
| 27 | Sekolah Rakyat Menengah Atas 27 Takalar | Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan |
| 28 | Sekolah Rakyat Menengah Atas 28 Tidore Kepulauan | Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara |
| 29 | Sekolah Rakyat Menengah Atas 29 Jayapura | Kota Jayapura, Provinsi Papua |
| 30 | Sekolah Rakyat Menengah Atas 30 Padang Sidempuan | Kota Padang Sidempuan, Provinsi Sumatera Utara |
| 31 | Sekolah Rakyat Menengah Atas 31 Pekanbaru | Kota Pekanbaru, Provinsi Riau |
| 32 | Sekolah Rakyat Menengah Atas 32 Lampung Selatan | Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung |
| 33 | Sekolah Rakyat Menengah Atas 33 Tangerang Selatan | Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten |
| 34 | Sekolah Rakyat Menengah Atas 34 Lebak | Kabupaten Lebak, Provinsi Banten |
| 35 | Sekolah Rakyat Menengah Atas 35 Wonosobo | Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah |
| 36 | Sekolah Rakyat Menengah Atas 36 Bojonegoro | Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur |
| 37 | Sekolah Rakyat Menengah Atas 37 Gresik | Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur |
| 38 | Sekolah Rakyat Menengah Atas 38 Lombok Timur | Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat |
| 39 | Sekolah Rakyat Menengah Atas 39 Makassar | Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan |
| 40 | Sekolah Rakyat Menengah Atas 40 Ambon | Kota Ambon, Provinsi Maluku |
| 41 | Sekolah Rakyat Menengah Atas 41 Biak Numfor | Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua |
| 42 | Sekolah Rakyat Menengah Atas 42 Sarmi | Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua |
| 43 | Sekolah Rakyat Menengah Atas 43 Magelang | Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah |
| 44 | Sekolah Rakyat Menengah Atas 44 Minahasa | Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara |
| 45 | Sekolah Rakyat Menengah Atas 45 Ogan Komering Ulu | Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan |
| 46 | Sekolah Rakyat Menengah Atas 46 Pacitan | Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur |

D. Sekolah Rakyat Terintegrasi

| NO | NOMENKLATUR | LOKASI |
|----|--|---|
| 1 | Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Cirebon | Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat |
| 2 | Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Banyuwangi | Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur |
| 3 | Sekolah Rakyat Terintegrasi 3 Pasuruan | Kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur |
| 4 | Sekolah Rakyat Terintegrasi 4 Sumedang | Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat |
| 5 | Sekolah Rakyat Terintegrasi 5 Ponorogo | Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur |

| NO | NOMENKLATUR | LOKASI |
|----|---|--|
| 6 | Sekolah Rakyat Terintegrasi 6 Jember | Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur |
| 7 | Sekolah Rakyat Terintegrasi 7 Probolinggo | Kota Probolinggo, Provinsi Jawa Timur |
| 8 | Sekolah Rakyat Terintegrasi 8 Jombang | Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur |
| 9 | Sekolah Rakyat Terintegrasi 9 Banjarbaru | Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan |
| 10 | Sekolah Rakyat Terintegrasi 10 Aceh Selatan | Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh |
| 11 | Sekolah Rakyat Terintegrasi 11 Rokan Hilir | Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau |
| 12 | Sekolah Rakyat Terintegrasi 12 Kepulauan Anambas | Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau |
| 13 | Sekolah Rakyat Terintegrasi 13 Tanjung Jabung Timur | Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi |
| 14 | Sekolah Rakyat Terintegrasi 14 Kaur | Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu |
| 15 | Sekolah Rakyat Terintegrasi 15 Empat Lawang | Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan |
| 16 | Sekolah Rakyat Terintegrasi 16 Bandung | Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat |
| 17 | Sekolah Rakyat Terintegrasi 17 Cimahi | Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat |
| 18 | Sekolah Rakyat Terintegrasi 18 Tuban | Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur |
| 19 | Sekolah Rakyat Terintegrasi 19 Wajo | Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan |
| 20 | Sekolah Rakyat Terintegrasi 20 Palu | Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah |
| 21 | Sekolah Rakyat Terintegrasi 21 Mamuju | Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat |
| 22 | Sekolah Rakyat Terintegrasi 22 Polewali Mandar | Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat |
| 23 | Sekolah Rakyat Terintegrasi 23 Katingan | Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah |
| 24 | Sekolah Rakyat Terintegrasi 24 Samarinda | Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur |
| 25 | Sekolah Rakyat Terintegrasi 25 Bireuen | Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh |
| 26 | Sekolah Rakyat Terintegrasi 26 Pidie Jaya | Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh |
| 27 | Sekolah Rakyat Terintegrasi 27 Aceh Singkil | Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh |
| 28 | Sekolah Rakyat Terintegrasi 28 Subulussalam | Kota Subulussalam, Provinsi Aceh |
| 29 | Sekolah Rakyat Terintegrasi 29 Tapanuli Selatan | Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara |
| 30 | Sekolah Rakyat Terintegrasi 30 Medan | Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara |
| 31 | Sekolah Rakyat Terintegrasi 31 Palembang | Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan |

| NO | NOMENKLATUR | LOKASI |
|----|---|--|
| 32 | Sekolah Rakyat Terintegrasi 32 Natuna | Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau |
| 33 | Sekolah Rakyat Terintegrasi 33 Tanjung Pinang | Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau |
| 34 | Sekolah Rakyat Terintegrasi 34 Lampung Timur | Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung |
| 35 | Sekolah Rakyat Terintegrasi 35 Bandar Lampung | Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung |
| 36 | Sekolah Rakyat Terintegrasi 36 Lebak | Kabupaten Lebak, Provinsi Banten |
| 37 | Sekolah Rakyat Terintegrasi 37 Serang | Kota Serang, Provinsi Banten |
| 38 | Sekolah Rakyat Terintegrasi 38 Kuningan | Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat |
| 39 | Sekolah Rakyat Terintegrasi 39 Garut | Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat |
| 40 | Sekolah Rakyat Terintegrasi 40 Indramayu | Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat |
| 41 | Sekolah Rakyat Terintegrasi 41 Tasikmalaya | Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat |
| 42 | Sekolah Rakyat Terintegrasi 42 Bandung | Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat |
| 43 | Sekolah Rakyat Terintegrasi 43 Bekasi | Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat |
| 44 | Sekolah Rakyat Terintegrasi 44 Kebumen | Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah |
| 45 | Sekolah Rakyat Terintegrasi 45 Semarang | Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah |
| 46 | Sekolah Rakyat Terintegrasi 46 Banyuwangi | Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur |
| 47 | Sekolah Rakyat Terintegrasi 47 Malang | Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur |
| 48 | Sekolah Rakyat Terintegrasi 48 Pasuruan | Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur |
| 49 | Sekolah Rakyat Terintegrasi 49 Sumenep | Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur |
| 50 | Sekolah Rakyat Terintegrasi 50 Trenggalek | Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur |
| 51 | Sekolah Rakyat Terintegrasi 51 Bangkalan | Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur |
| 52 | Sekolah Rakyat Terintegrasi 52 Ketapang | Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat |
| 53 | Sekolah Rakyat Terintegrasi 53 Pontianak | Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat |
| 54 | Sekolah Rakyat Terintegrasi 54 Gunung Mas | Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah |
| 55 | Sekolah Rakyat Terintegrasi 55 Kotawaringin Timur | Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah |
| 56 | Sekolah Rakyat Terintegrasi 56 Banjarbaru | Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan |
| 57 | Sekolah Rakyat Terintegrasi 57 Samarinda | Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur |

| NO | NOMENKLATUR | LOKASI |
|----|--|---|
| 58 | Sekolah Rakyat Terintegrasi 58 Samarinda | Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur |
| 59 | Sekolah Rakyat Terintegrasi 59 Tarakan | Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara |
| 60 | Sekolah Rakyat Terintegrasi 60 Tojo Una-Una | Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah |
| 61 | Sekolah Rakyat Terintegrasi 61 Bone | Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan |
| 62 | Sekolah Rakyat Terintegrasi 62 Tana Toraja | Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan |
| 63 | Sekolah Rakyat Terintegrasi 63 Sinjai | Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan |
| 64 | Sekolah Rakyat Terintegrasi 64 Soppeng | Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan |
| 65 | Sekolah Rakyat Terintegrasi 65 Barru | Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan |
| 66 | Sekolah Rakyat Terintegrasi 66 Sidenreng Rappang | Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan |
| 67 | Sekolah Rakyat Terintegrasi 67 Pangkajene Kepulauan | Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan |
| 68 | Sekolah Rakyat Terintegrasi 68 Luwu Utara | Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan |
| 69 | Sekolah Rakyat Terintegrasi 69 Buton Tengah | Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara |
| 70 | Sekolah Rakyat Terintegrasi 70 Kendari | Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara |
| 71 | Sekolah Rakyat Terintegrasi 71 Boalemo | Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo |
| 72 | Sekolah Rakyat Terintegrasi 72 Mamuju | Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat |
| 73 | Sekolah Rakyat Terintegrasi 73 Maluku Tengah | Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku |
| 74 | Sekolah Rakyat Terintegrasi 74 Tual | Kota Tual, Provinsi Maluku |
| 75 | Sekolah Rakyat Terintegrasi 75 Jayapura | Kota Jayapura, Provinsi Papua |
| 76 | Sekolah Rakyat Terintegrasi 76 Mimika | Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah |
| 77 | Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke | Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan |
| 78 | Sekolah Rakyat Terintegrasi 78 Sragen | Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah |

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAIFULLAH YUSUF